

METODE PENGEMBANGAN AGRIBISNIS JARAK PAGAR BERBASIS MASYARAKAT UNTUK Mendukung Sumber Energi Alternatif (*Biodiesel*) di Jawa Timur

Bambang Yudi Ariadi¹

¹ Fakultas Ekonomi, Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : Perum Bumi Asri Blok N.26 Sengkaling Malang
Telpon: 0341-460865, Hp: 08123317597
E-mail: yudi@umm.ac.id

ABSTRACT

Third phase of research conducted to evaluate the local resource-based institution, The following objectives: 1) knowing participation in the development of "jarak pagar", 2) who participated in the development of absolute "jarak pagar" 3) formulate methods of agribusiness development "jarak pagar".

Research conducted in the District of Grati, Pasuruan regency. Units of analysis are farmers, farm group relations, group relations and the partner company or industry processing "jarak pagar" Analysis used is descriptive analysis with quantitative data presented in the table and cross.

Research results are as follows: 1) Institutional Development in the "jarak pagar" a lot of people involved with the ownership of resources and skills is low, while a lack of social support network to enter the modern economy, 2) the development of embryo of "jarak pagar" in East Java beginning of understanding between PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) with the Office of East Java Province, and 3) institutional Transformasi traditional to the modern agriculture in the development of "jarak pagar" changes in behavior, not only through changes in structure, but also the changes various aspects of the abstract form of behavior, which changes the system of values, norms, orientation, and goals.

PENDAHULUAN

Jatropha curcas L. dikenal dengan "Jarak pagar" dimanfaatkan sebagai bahan baku *biodiesel* dan potensial dikembangkan menjadi sumber energi masa depan, hal ini dikarenakan minyak biji "jarak pagar" tidak termasuk dalam kategori minyak makanan (*edible oil*), sehingga pemanfaatannya sebagai *biodiesel* tidak mengganggu penyediaan kebutuhan minyak makan nasional, kebutuhan industri kimia dan ekspor CPO. Selain itu tanaman ini tahan terhadap kekeringan, sehingga mampu berkembang dilahan marginal.

Keberhasilan pengembangan "jarak pagar" ditunjukkan dengan posisi tawar yang kuat bagi petani dalam mekanisme pasar. Untuk itu mekanisme dalam menciptakan posisitawar yang kuat perlu dikaji secara mendalam, Dukungan data bagaimana lingkungan agribisnis dan pola relasi pelaku agribisnis serta kajian kelayakan aspek teknis, ekonomis dan sosial pada tahap kedua merupakan modal ilmiah yang mutlak diperlukan.

Penelitian dilakukan dalam tiga tahap dengan tujuan akhir diperoleh modal ilmiah untuk merumuskan **metode pengembangan agribisnis "jarak pagar" berbasis masyarakat untuk mendukung sumber energi alternatif (*biodiesel*) di Jawa Timur.**

Naskah publikasi ini merupakan hasil penelitian tahap ketiga yang lebih difokuskan untuk mengevaluasi sumberdaya yang berbasis **kelembagaan lokal**, dengan tujuan: 1) mengetahui partisipasi dalam pengembangan "jarak pagar", 2) siapa yang berpartisipasi mutlak dalam pengembangan "jarak pagar" 3) bagaimana partisipasi dalam pengembangan "jarak pagar" dan 4) merumuskan metode pengembangan agribisnis "jarak pagar"

Dalam rangkaian penelitian tahap pertama dan kedua sudah ditemukan lingkungan agribisnis "jarak pagar" dan relasi pelaku usaha secara *backward* dan *forward linkage* agribisnis "jarak pagar" sebagai dasar untuk memahami sistem agribisnis "jarak pagar" serta mengevaluasi sumberdaya berbasis pengetahuan lokal, Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan dan penting adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Agribisnis "jarak pagar"

Kepastian pasokan input dan pasar biji "jarak pagar" menjadi modal dasar dalam menciptakan ketangguhan dalam berusatan "jarak pagar". Hasil penelitian menunjukkan dalam melakukan kegiatan budidaya "jarak pagar" petani yang tergabung dalam kelompok tani mitra menyediakan lahan untuk digunakan budidaya, sebagian besar lahan berupa tanah tegal. Budidaya "jarak pagar" dilakukan dengan cara monokultur dan sebagian dengan cara tumpangsari dengan tanaman pangan (jagung dan ketela pohon), tanaman buah (mangga).

Tujuan kebutuhan benih dan pupuk serta cara budidaya "jarak pagar" yang benar dibantu oleh kelompok tani mitra. Pendampingan kelompok tani mitra terjadi terus menerus sampai tanaman berproduksi, seluruh hasil produksi yang dihasilkan petani dikumpulkan dan dibeli kelompok mitra. Selanjutnya biji "jarak pagar" oleh kelompok mitra seluruhnya dijual ke perusahaan mitra (PT Kebun Grati Agung (KGA)) dengan sistem bagi hasil berupa minyak mentah (*crude jatropha oil*) sebanyak 65% kelompok mitra dan 35% perusahaan mitra.

Keterkaitan agro-input, pertanian dan agro-output dalam suatu sistem agribisnis "jarak pagar" dapat diilustrasikan sebagaimana pada gambar berikut ini:



Gambar. 1. Keterkaitan Petani/penggarap usahatani "jarak pagar" secara *backward linkage* (Agroindustri hulu) dan *forward linkage* (Agroindustri hilir).

Pengembangan usahatani "jarak pagar" yang dihasilkan oleh petani sangat ditentukan oleh dukungan sektor lain, yaitu industri yang menyediakan bibit dan teknologi budidaya "jarak pagar". Dukungan ini sangat berarti bagi usahatani, karena akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam proses produksi biji "jarak pagar", yang Agroindustri hulu: Penyedia bibit "jarak pagar" dan Teknologi Budidaya Agroindustri hilir: Pengolah biji "jarak pagar" menjadi minyak mentah (*crude jatropha oil*) Petani/Penggarap Usahatani "jarak pagar" pada akhirnya akan menentukan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi biji "jarak pagar" yang dihasilkan. Keterkaitan kebelakang dari usahatani "jarak pagar" adalah dukungan yang konsisten dari agroindustri yang menghasilkan input bagi petani/penggarap usahatani "jarak pagar". PT Kebun Grati Agung (KGA) yang merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan

agroindustri yang menyediakan kebutuhan usahatani, yang dalam hal ini KGA secara konsisten menyediakan bibit "jarak pagar" serta paket teknologi budidaya "jarak pagar". Agar bibit dan paket teknologi ini sampai pada petani/ penggarap usahatani "jarak pagar" diperlukan institusi lain yang secara efektif menghubungkan dengan sasaran. KGA menjalin kerjasama dengan kelompok mitra sebagai institusi yang berperan dalam menyalurkan kebutuhan input bagi petani/penggarap. Kelompok mitra ini sangat strategis dalam meningkatkan ketersediaan input (bibit dan teknik budidaya) secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas bagi petani/penggarap.

Disamping itu petani sebagai pelaku dalam usahatani "jarak pagar" sangat menaruh perhatian terhadap kepastian pasar. Petani sangat berkepentingan dengan agroindustri hilir yang menyerap biji "jarak pagar" untuk diolah menjadi minyak mentah (*crude jatropha oil*). Agroindustri hilir ini menjadi daya tarik yang kuat bagi petani dalam

berusahatani “jarak pagar”, tidak jarak ditemui dilapang, banyak petani yang tidak sungguh-sungguh dalam berusahatani “jarak pagar”, bahkan ada yang menggantikan dengan komoditas lainnya karena persoalan tidak jelasnya daya serap pasar biji “jarak pagar”. Untuk meningkatkan ketangguhan pada usahatani “jarak pagar” keterkaitan kedepan dengan agroindustri yang mengolah biji “jarak pagar” menjadi minyak mentah (*crude jatropa oil*) sebagai sumber energi alternatif merupakan suatu keharusan. Hasil penelitian menemukan KGA disamping berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan usahatani “jarak pagar” bagi petani, juga sekaligus menampung semua biji “jarak pagar” yang dihasilkan petani, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Rajawali Nusantara Indonesia dengan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (terlampir). Nota kesepahaman ini merupakan payung hukum dan regulasi dalam pengembangan “jarak pagar” untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak dan mendukung bahan bakar alternatif di Jawa Timur.

Keterkaitan kebelakang dan kedepan dalam usahatani jarak pagar ini menjadi modal dasar dalam pengembangan agribisnis “jarak pagar”. Usahatani berkepentingan dengan agroindustri hulu, demikian pula agroindustri hilir berkepentingan dengan usahatani. Atas dasar ini pula pola pengembangan agribisnis “jarak pagar” di Jawa Timur mulai dilakukan.

b. Pengetahuan Lokal Pengembangan Agribisnis “jarak pagar”

Dalam kegiatan pengembangan agribisnis “jarak pagar” ada kendala yang serius baik yang menyangkut persoalan teknis, ekonomis dan resiko ketidakpastian. Kendala teknis meliputi ketidakmampuan untuk mempraktekkan teknologi produksi dengan baik, sedangkan kendala ekonomi adalah ketidakmampuan menyediakan biaya yang diperlukan untuk alokasi faktor produksi optimal. Faktor resiko ketidakpastian (*resk and uncertainty*) merupakan bayang-bayang yang dihadapi masyarakat dan mempengaruhi daya inovasi dalam pengembangan “jarak pagar”. Sumber ketidakpastian yang penting adalah masalah kepastian pasar yang menyangkut pasokan input (khususnya bibit) dan harga biji “jarak pagar”. Ketidakpastian harga lebih banyak disebabkan oleh faktor alam. Hasil pertanian yang gagal akan berpengaruh terhadap

keputusan dalam berusahatani mendatang. Ketidakpastian harga hasil pertanian sulit diprediksi secara tepat, mengingat begitu kompleksnya faktor yang menyebabkan fluktuasi harga.

Kendala teknis, ekonomis dan faktor resiko ketidakpastian menjadi indikator penting dalam menentukan kualifikasi dan sikap petani dalam pengembangan agribisnis “jarak pagar”.

c. Redistribusi manfaat ekonomi.

Kepastian pasokan input dan pasar biji “jarak pagar” menjadi modal dasar dalam menciptakan ketangguhan dalam berusahatani “jarak pagar”. Hasil penelitian menunjukkan dalam melakukan kegiatan budidaya “jarak pagar” petani yang tergabung dalam kelompok tani mitra menyediakan lahan untuk digunakan budidaya, sebagian besar lahan berupa tanah tegal. Budidaya “jarak pagar” dilakukan sebagian petani melakukan dengan cara monokultur dan sebagian dengan cara tumpangsari dengan tanaman pangan (jagung dan ketela pohon), tanaman buah (mangga).

Untuk kebutuhan benih dan pupuk serta cara budidaya “jarak pagar” yang benar dibantu oleh kelompok tani mitra. Pendampingan budidaya oleh kelompok tani mitra terjadi terus menerus sampai tanaman berproduksi, seluruh hasil produksi yang dihasilkan petani dikumpulkan dan dibeli kelompok mitra dengan harga yang telah disepakati bersama sebesar Rp 500/kg. Selanjutnya biji “jarak pagar” yang telah dikumpulkan kelompok mitra seluruhnya dijual ke perusahaan mitra (PT Kebun Grati Agung (KGA)) dengan sistem bagi hasil berupa minyak mentah (*crude jatropa oil*) sebanyak 65% kelompok mitra dan 35% perusahaan mitra.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan pelaksana operasional dan menyediakan serta memiliki teknologi yang mampu mengolah biji “jarak pagar” menjadi bahan bakar alternatif. Yang dimaksudkan biji “jarak pagar” adalah buah “jarak pagar” yang sudah dikupas daging buahnya. PT Kebun Grati Agung (KGA) merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan perusahaan yang menyediakan teknologi (pupuk, bibit dan budidaya) dan agroindustri yang mengolah biji “jarak pagar” menjadi minyak mentah (*crude jatropa oil*) untuk sumber bahan bakar alternatif sebagai

substitusi atau suplemen bahan bakar minyak. PT Kebun Grati Agung (KGA) adalah perusahaan mitra yang menjalin kerjasama dalam pengembangan “jarak pagar” dengan kelompok mitra. Sebagai Perusahaan mitra ini berkewajiban; a) memberikan pinjaman bibit “jarak pagar”, b) menyediakan unit pengolahan biji “jarak pagar”, c) mensosialisasikan cara penanaman “jarak pagar” dan d) menampung semua produksi yang dihasilkan oleh kelompok mitra berupa biji “jarak pagar” untuk diolah menjadi minyak mentah (*crude jatropa oil*). Kewajiban perusahaan mitra dengan kelompok mitra diatur dalam perjanjian kerjasama secara khusus.

Kelompok Mitra yang merupakan mitra kerja dari perusahaan mitra dalam pengembangan agribisnis “jarak pagar” bertugas untuk ; a) menyediakan lahan untuk budidaya “jarak pagar”, b) membiayai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tanaman “jarak pagar”, c) mengawasi proses kegiatan pelaksanaan penanaman “jarak pagar” dan d) mengembalikan pinjaman bibit pada saat panen pertama.

Kelompok Tani Mitra merupakan kelompok tani yang bermitra dengan Kelompok Mitra. Kedudukan Kelompok Tani Mitra tidak dibatasi pada satu wilayah administrasi saja, tetapi tersebar pada seluruh daerah di Jawa Timur. Kewajiban Kelompok Tani Mitra diatur secara khusus oleh Kelompok Mitra, hal ini dapat dimengerti karena kelompok tani mitra ini merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan petani atau penggarap budidaya “jarak pagar” serta luasnya cakupan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Keberhasilan pengembangan agribisnis “jarak pagar” ini sangat ditentukan oleh kelompok tani mitra.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Unit analisis adalah pelaku agribisnis jarak pagar, yang meliputi petani, kelompok tani mitra, kelompok mitra dan perusahaan mitra atau industri pengolah. Sampel diperoleh dengan cara ditelusuri mulai dari industri pengolah, pemasok biji “jarak pagar”, kelompok tani dan petani/penggarap usahatani “jarak pagar”. Metode ini efektif dilakukan mengingat tanaman “jarak pagar” merupakan suatu tanaman baru yang bersifat top down. Penelusuran sampel dimulai dari Perusahaan pengolah yang dalam

hal ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau PT Kebun Grati Agung (KGA), kemudian dilanjutkan kepada kelompok mitra, kelompok petani mitra dan berakhir kepetani/penggarap.

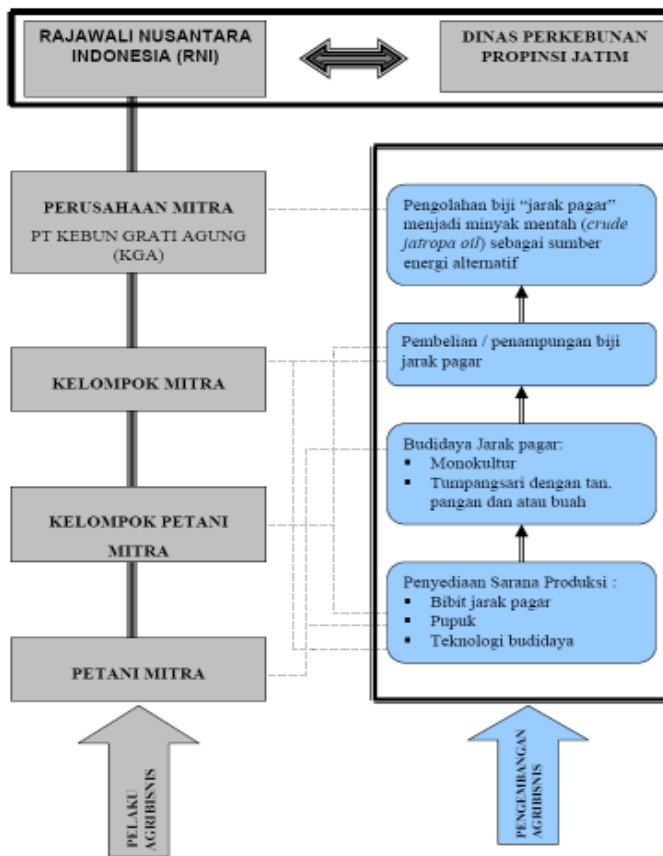
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dilengkapi dengan data kuantitatif dan disajikan dalam tabel silang. Sekaligus untuk menjelaskan secara komprehensif temuan dilapang tentang bagaimana metode pengembangan agribisnis jarak pagar berbasis masyarakat untuk mendukung sumber energi alternatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Pendekatan Kelembagaan Pengembangan “jarak pagar”

Kepastian pasokan input dan pasar biji “jarak pagar” menjadi modal dasar dalam menciptakan ketangguhan dalam berusahatani “jarak pagar”. Hasil penelitian menunjukkan dalam melakukan kegiatan budidaya “jarak pagar” petani yang tergabung dalam kelompok tani mitra menyediakan lahan untuk digunakan budidaya, sebagian besar lahan berupa tanah tegal. Budidaya “jarak pagar” dilakukan sebagian petani melakukan dengan cara monokultur dan sebagian dengan cara tumpangsari dengan tanaman pangan (jagung dan ketela pohon), tanaman buah (mangga).

Untuk kebutuhan benih dan pupuk serta cara budidaya “jarak pagar” yang benar dibantu oleh kelompok tani mitra. Pendampingan budidaya oleh kelompok tani mitra terjadi terus menerus sampai tanaman berproduksi, seluruh hasil produksi yang dihasilkan petani dikumpulkan dan dibeli kelompok mitra dengan harga yang telah disepakati bersama sebesar Rp 500/kg. Selanjutnya biji “jarak pagar” yang telah dikumpulkan kelompok mitra seluruhnya dijual ke perusahaan mitra (PT Kebun Grati Agung (KGA)) dengan sistem bagi hasil berupa minyak mentah (*crude jatropa oil*) sebanyak 65% kelompok mitra dan 35% perusahaan mitra. Selengkapny relasi pelaku agribisnis dalam pengembangan agribisnis “jarak pagar dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 2. Struktur Pengembangan Agribisnis "jarak pagar" di Jawa Timur.

Pada gambar 2 diatas dapat dijelaskan struktur pengembangan agribisnis "jarak pagar" sebagaimana hal-hal berikut ini:

1. Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur
2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan pelaksana operasional dan menyediakan serta memiliki teknologi yang mampu mengolah biji "jarak pagar" menjadi bahan bakar alternatif. Yang

dimaksudkan biji "jarak pagar" adalah buah "jarak pagar" yang sudah dikupas daging buahnya.

3. PT Kebun Grati Agung (KGA) merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang berkedudukan di Pasuruan adalah perusahaan yang menyediakan teknologi (pupuk, bibit dan budidaya) dan agroindustri yang mengolah biji "Jarak Pagar" menjadi minyak mentah (*crude jatropa oil*) untuk sumber bahan bakar alternatif

sebagai substitusi atau suplemen bahan bakar minyak. PT Kebun Grati Agung (KGA) adalah perusahaan mitra yang menjalin kerjasama dalam pengembangan "jarak pagar" dengan kelompok mitra. Sebagai Perusahaan mitra ini berkewajiban; a) memberikan pinjaman bibit "jarak pagar", b) menyediakan unit pengolahan biji "jarak pagar", c) mensosialisasikan cara penanaman "jarak pagar" dan d) menampung semua produksi yang dihasilkan oleh kelompok mitra berupa biji "jarak pagar" untuk diolah menjadi minyak mentah (*crude jatropa oil*). Kewajiban perusahaan mitra dengan kelompok mitra diatur dalam perjanjian kerjasama secara khusus.

4. Kelompok Mitra yang merupakan mitra kerja dari perusahaan mitra dalam pengembangan agribisnis "jarak pagar" bertugas untuk; a) menyediakan lahan untuk bididaya "jarak pagar", b) membiayai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tanaman "jarak pagar", c) mengawasi proses kegiatan pelaksanaan penanaman "jarak pagar" dan d) mengembalikan pinjaman bibit pada saat panen pertama.

5. Kelompok Tani Mitra merupakan kelompok tani yang bermitra dengan Kelompok Mitra. Kedudukan Kelompok Tani Mitra tidak dibatasi pada satu wilayah administrasi saja, tetapi tersebar pada seluruh daerah di Jawa Timur. Kewajiban Kelompok Tani Mitra diatur secara khusus oleh Kelompok Mitra, hal ini dapat dimengerti karena kelompok tani mitra ini merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan petani atau penggarap budidaya "jarak pagar" serta luasnya cakupan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Keberhasilan pengembangan agribisnis "jarak pagar" ini sangat ditentukan oleh kelompok tani mitra. Secara prinsip kewajiban Kelompok Tani Mitra ini sama dengan kewajiban Kelompok Mitra, tugas yang utama dan yang membutuhkan penanganan serius adalah mengawasi proses kegiatan penanaman "jarak pagar". Mengingat tanaman "jarak pagar" ini merupakan tanaman baru bagi petani/ penggarap dan tidak memberikan jaminan pendapatan/kesejahteraan dalam kehidupannya. Kelompok Tani Mitra harus "santun" dalam melakukan pendekatan dengan petani/ penggarap.

6. Petani atau penggarap budidaya "jarak pagar" melakukan usahataniannya secara monokultur

maupun tumpang sari dengan tanaman pangan dan atau tanaman buah.

Salah satu ciri khas pengembangan "jarak pagar" adalah melibatkan banyak orang dengan pemilihan sumber daya dan keterampilan yang rendah, serta *social network* yang kurang mendukung, khususnya untuk memasuki ekonomi modern saat ini. Hal ini berakibat kinerja ekonomi pedesaan yang berbasis "jarak pagar" cenderung lemah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan *network* tersebut adalah melalui strategi pendekatan kelembagaan, yang selama ini belum mendapat penanganan yang memadai.

Rendahnya kapasitas kelembagaan ekonomi disebabkan antara lain oleh pelaksanaan program yang tidak berbasiskan kelembagaan lokal yang telah ada, sehingga kondisinya semakin memudar. Introduksi kelembagaan dari luar yang terasa asing bagi masyarakat berimplikasi kepada lemahnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan tersebut. Akibatnya, partisipasi masyarakat secara keseluruhan lemah dalam aktifitas pembangunan/pengembangan "jarak pagar".

Kelembagaan ekonomi dalam pengembangan "jarak pagar" yang dibentuk dari nilai-nilai tradisional memiliki akses yang kecil terhadap kelembagaan modern, sehingga interaksi antar kelembagaan ekonomi menjadi rendah. Karena itulah, transformasi kelembagaan tradisional menjadi suatu yang esensial, demi tercapainya sinergi optimum dalam aktivitas jaringan ekonomi di tingkat lokal. Transformasi kelembagaan tradisional ke arah pertanian modern dalam pengembangan "jarak pagar" berintikan pada perubahan **perilaku**, tidak hanya melalui perubahan **struktur** saja, tetapi juga menyangkut perubahan berbagai **aspek abstrak** yang membentuk perilaku tersebut, yaitu berupa perubahan **sistem nilai, norma, orientasi, tujuan, dan lain-lain**. Tataran ini menjadi penting dirumuskan, khususnya dalam konteks pengembangan "jarak pagar" yang tentunya akan sangat spesifik lokal. Bagaimana masyarakat lokal ikut terlibat dalam memaknai (mengisi) otonomi daerah tersebut, khususnya untuk kepentingan ekonominya sendiri, masih merupakan bidang yang perlu ditemukan model pengembangannya. Penguatan jaringan ekonomi kerakyatan di pedesaan perlu dipandang sebagai suatu

keharusan, dimana penguatannya merupakan salah satu titik perhatian dari studi kelembagaan. Membangun kelembagaan untuk memperkuat jaringan ekonomi kerakyatan di pedesaan yang berbasis sumberdaya pertanian setempat, adalah juga berarti mengembangkan budaya non-material untuk meningkatkan daya saing modal sosial (*social capital*) di pedesaan. Dari kacamata ekonomi, penguatan kelembagaan pedesaan harus mempunyai makna peningkatan daya saing ekonomi pertanian di pedesaan.

Partisipasi dan Peran Strategis Masyarakat

Hal lain yang amat penting untuk ditekankan dalam pengembangan "jarak pagar" adalah peranan atau partisipasi masyarakat lokal mulai ditingkat petani/peggarap, pedagang dan industri pengolah biji "jarak pagar" diarahkan untuk selalu mendorong pada peningkatan kapasitas pengembangan "jarak pagar".

Di daerah penelitian, nilai sosial budaya lokal atau kearifan lokal tersebut telah terlembaga dengan baik dalam masyarakat, dan menjiwai semua aktivitas masyarakat tersebut. Petani secara khusus hidup dalam kesederhanaan, mereka telah mengembangkan mekanisme dalam upaya memenuhi kebutuhannya, menjangkau sumber dan pelayanan serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Mekanisme tersebut dilembagakan dalam sebuah wahana yang berupa organisasi/kelompok mitra yang mengendalikan kegiatan berusahatani ditingkat petani/peggarap dan kelompok industri yang dalam hal ini KGA (Kebun Grati Agung) yang merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan perusahaan yang menyediakan teknologi (pupuk, bibit dan budidaya) dan agroindustri yang mengolah biji "Jarak Pagar" menjadi minyak mentah (*crude jatropa oil*) untuk sumber bahan bakar alternatif sebagai substitusi atau suplemen bahan bakar minyak.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa keberadaan organisasi yang telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat lokal, telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah pengembangan "jarak pagar". Organisasi/kelompok yang ada memperlihatkan ciri-ciri, seperti egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi bagi seluruh anggota, penegakan hukum dan keadilan, toleransi

dan pluralisme serta mengembangkan musyawarah. Ciri-ciri organisasi lokal ini telah mengakomodasi unsur hak asasi manusia dan demokratisasi pada tingkat lokal. Karena itu, apabila berbagai ciri yang melekat pada organisasi lokal ini dapat dipertahankan, akan semakin memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Sehubungan dengan itu, organisasi dan kearifan lokal, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan masyarakat khususnya untuk meningkatkan pengembangan "jarak pagar".

Lebih jauh dari itu, berkembangnya keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Kortzen (1982), bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*people centered development*). Dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi lokal yang ada di masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan, Sediono Tjandrongoro (Kompas, 1982) mengemukakan, bahwa bentuk kelompok informal yang tumbuh dari bawah dan berciri demokratik, merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembinaan kelompok informal ini menyebabkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa bisa efektif. Pemikiran ini sesuai dengan Agenda 21 yang menekankan tanggung jawab khusus dari otoritas lokal dengan konsep "*berpikir global, bertindak lokal*", dan deklarasi IULA (*International Union of Lokal Authorities*) dan EU (*European Union*) tahun 1985, dimana adanya keharusan bagi otoritas lokal di seluruh dunia memberikan prioritas untuk partisipasi bagi organisasi lokal, perusahaan swasta, perempuan dan pemuda, dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasi proyek-proyek lokal dan perencanaan "Agenda 21" atau semua hal yang bersifat lokal (Izzedin Bakht, 2001).

Dalam perspektif pekerjaan sosial, nilai sosial budaya dan organisasi lokal tersebut merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau modal sosial (*social capital*) dalam rangka pembangunan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan organisasi

dan kearifan lokal tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat. Organisasi masyarakat lokal diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dengan sasaran-sasaran strategis untuk berkurangnya desa tertinggal dan terisolir, berkurangnya indeks kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja, berkembangnya perekonomian lokal masyarakat, kuatnya jaringan informasi dan ekonomi serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

Cikal bakal pengembangan "jarak pagar" di Jawa Timur diawali dari Nota Kesepahaman antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur. Pengembangan "jarak pagar" di wilayah Jawa Timur didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu Pemerintah dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak, dengan cara mencari sumber bahan bakar alternatif sebagai substitusi atau suplemen bahan bakar minyak.

2. Bahan bakar alternatif dari minyak "jarak pagar" (*Jatropha curcas L.*) dapat dikembangkan secara mandiri dan ekonomis.
3. Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan petani Jawa Timur khususnya yang berada di Wilayah Binaan Gerdu-Taskin, melalui upaya pemanfaatan lahan secara optimal.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah Jawa Timur untuk mengembangkan tanaman "jarak pagar" sampai dengan tahun 2007 sudah mencapai lahan seluas 5.000 hektar, yang meliputi wilayah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Madura, Mojokerto, Tuban, Lamongan dan Sidoarjo.

Untuk meningkatkan efektifitas dalam pengembangan tanaman "jarak pagar" dengan memanfaatkan lahan tidur atau tidak produktif milik petani di Jawa Timur, dilakukan kerjasama dengan pesantren atau kelompok masyarakat lainnya. Kelompok ini selanjutnya dikenal dengan "Kelompok Mitra". Peran strategis yang dilakukan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Peran Strategis Pelaku Agribisnis "jarak pagar"

No.	Pelaku Agribisnis	Peran Strategis
1.	Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari sumber bahan bakar alternatif sebagai substitusi atau suplemen bahan bakar minyak. • Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Petani/Kelompok Tani di Wilayah Binaan Gerdu-Taskin (Gerakan Terpadu Pengembangan Kemiskinan) guna memfasilitasi lahan tidak produktif untuk budidaya tanaman "jarak pagar".
2.	PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan operasional dan menyediakan serta memiliki teknologi untuk pengolahan biji "jarak pagar" menjadi bahan bakar alternatif.
3.	PT Kebun Ciri Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Petani pengolah biji "jarak pagar" menjadi menjadi minyak mentah (<i>crude jatropa oil</i>) sebagai sumber energi alternatif. • Bekerjasama dengan kelompok mitra untuk budidaya tanaman "jarak pagar". • Menampung dan membeli seluruh biji "jarak pagar" dari kelompok mitra.
4.	Kelompok Mitra	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan kelompok tani mitra untuk budidaya tanaman "jarak pagar". • Menyediakan bibit dan paket teknologi budidaya. • Membeli seluruh hasil hasil produksi petani mitra dan memasrahkan ke KGA.
5.	Kelompok Petani Mitra	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan petani untuk budidaya tanaman "jarak pagar". • Menyediakan bibit dan paket teknologi budidaya. • Membeli seluruh hasil hasil produksi petani mitra dan memasrahkan ke kelompok mitra.
6.	Petani/Peggarap	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk budidaya tanaman "jarak pagar".

Sumber: Nota Kesepahaman Dinas Perkebunan, RNI, KGA dan Kelompok Mitra.

Metode pengembangan agribisnis jarak pagar berbasis masyarakat

Pembangunan pedesaan merupakan proses penyadaran sosial guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat, dan pada akhirnya masyarakat memiliki kemampuan secara mandiri untuk menentukan pilihan bagi kehidupannya. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan, perhatian ditekankan pada perbaikan ragam kelembagaan yang berdayaguna dan berhasilguna serta ke arah pencapaian pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih baik. Pendekatan “*agricultural development*” yang dikombinasikan dengan “*rural development*” menjadi satu program pembangunan pedesaan komprehensif, yaitu: “*ruralagricultural development*”, yang langsung menuju ke sasaran. Pengembangan

Dampak dari pembangunan yang serba *sentralistik* adalah suatu *kesenjangan* antara realitas makro dan mikro, yaitu relatif makmur secara nasional (makro) namun miskin secara lokal (mikro). Di tingkat lokal, kondisi ini melahirkan beragam bentuk protes ketidakpuasan masyarakat lokal/tradisional yang menuntut keadilan, mulai dari bentuk apatisisme, penarikan diri, unjuk rasa, pemberontakan lokal.

Upaya pembangunan perekonomian dan kelembagaan pedesaan seharusnya berbasis sumberdaya pertanian dan pedesaan setempat. Artinya, mengembangkan budaya nonmaterial untuk meningkatkan daya saing modal sosial (*social capital*) di pedesaan, yang mencerminkan adanya *penghargaan* azas keadilan dan keberlanjutan. Dari sisi ekonomi, penguatannya harus bermakna peningkatan daya saing ekonomi pertanian dipedesaan.

Simpulan Kritis Permasalahan Metode Pengembangan “Jarak Pagar”

Simpulan kritis permasalahan dalam metode pengembangan “Jarak Pagar” yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan ekonomi desa terfokus pada upaya peningkatan produksi biji “jarak pagar” dalam jangka pendek dengan tekanan kegiatan di lapang pada penerapan teknologi produksi.

2. Kelembagaan lebih ke tujuan distribusi bantuan dan memudahkan aparat pemerintah mengontrol pelaksanaan program pembangunan di lapangan, dan bukan ditekankan pada peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan.
3. Pembentukan kelembagaan seharusnya ditekankan untuk memperkuat ikatan horizontal daripada memperkuat ikatan vertikal.
4. Pengembangan kelembagaan cenderung menggunakan pendekatan struktural dibanding kultural, dengan harapan perilaku dan tindakan masyarakat akan mengikutinya.
5. Introduksi kelembagaan baru umumnya telah merusak kelembagaan lokal dengan makin lemahnya ikatan horizontal antar pelaku sosial dan ekonomi di pedesaan, dikarenakan kegiatan proyek umumnya bersifat sektoral dan antar tahun bersifat kontiniu.
6. Pengembangan kelembagaan melalui jalur program pemerintah umumnya sarat slogan dan jargon politik daripada upaya nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.
7. Aspek teknologi masih dijadikan jurus klasik perancang kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah marginalisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Masalah kelembagaan yang semakin lemah justru dipandang dengan hanya sebelah mata.
8. Kelembagaan pendukung belum dikembangkan dengan baik, karena pelaksanaan pembangunan terutama di pedesaan, terjebak dalam pendekatan sektoral.
9. Sikap dan tindakan (aparat) pemerintah di atas ditopang lemahnya pola pikir dan pemahaman kelembagaan, mencakup aspek fungsi dan kekuatannya menggerakkan pembangunan pedesaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan “jarak pagar” melibatkan banyak orang dengan pemilikan sumber daya dan keterampilan yang rendah, sementara *social network* yang kurang

mendukung, khususnya untuk memasuki ekonomi modern.

- 2) Cikal bakal pengembangan “jarak pagar” di Jawa Timur diawali dari Nota Kesepahaman antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan Dinas perkebunan Propinsi Jawa Timur.
- 3) Tranformasi kelembagaan tradisional ke arah pertanian modern dalam pengembangan “jarak pagar” berintikan pada perubahan perilaku, tidak hanya melalui perubahan struktur saja, tetapi juga menyangkut perubahan berbagai aspek abstrak yang membentuk perilaku tersebut, yaitu berupa perubahan sistem nilai, norma, orientasi, dan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002. *Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi*. Edisi VII. Jakarta: Dirjen Dikti, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- , 2004. *Jawa Timur Dalam Angka*. BPS Propinsi. Surabaya. Armand Sudiyono, 1997. *Tataniaga Pertanian*. Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bayu Krisnamurthi, 2002. *Strategi Pemabangunan Ekonomi Rakyat, Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Daerah*. Pusat Studi Pembangunan IPB.
- Bambang Yudi A., 2004. *Aplikasi Analisis Biaya, Volume dan Laba pada Agroindustri Kripik Pisang*. Hasil Penelitian Dosen Muda. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bary, PJ, 1984. *Risk Management in Agriculture*. The IOWA State University Press.. Davis and Cosenza, 1993. *Business Research for Decision Making*. Third Edition. Wadsworth Publishing Company, Belmont – California – USA.
- Dillon H.S, 1999. *Pertanian Membangun Bangsa*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Downey W.D. dan Erickson S.P., 1987. *Manajemen Agribisnis*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Erliza Hambali, dkk, 2006. *Jarak Pagar Tanaman Penghasil Biodiesel*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Kotler, Philip (1994). *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control*. Eighth Edition. Prentice Hall International, New Jersey – USA.

Soekartawi, 1993. *Resiko dan Ketidakpastian Dalam Agribisnis: Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soekanto R. dan Indriyo G. 2000. *Manajemen Produksi*. BPFE, UGM. Yogyakarta